



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIANI ISYANA PRAMASANTHI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 413489

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/84 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	903.250.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000		
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. LAINNYA, LANKELEISI XT600 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
5. LAINNYA, SEPEDA ELEMEN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
6. MOTOR, HONDA BEAT DELUXE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
7. MOBIL, MAZDA CX-3 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	147.295.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	797.622.296



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.048.167.296
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.048.167.296

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama** : SRI RACHMINI BOGANIWATI
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 830552

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/54 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 336.000.000

- MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
- MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
- MOBIL, MITSUBISHI X-PANDER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 299.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 96.918.171

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.082.918.171

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.082.918.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASUKI TEDJOSUGONDO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **921317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	470.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
2. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	88.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.114.834
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	564.114.834
III. HUTANG	Rp.	570.685.498
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-6.570.664

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.